

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan pangan sebagai salah satu peran strategis sektor pertanian merupakan tugas yang tidak ringan sehingga kementerian pertanian salah satunya menempatkan beras jagung kedelai daging sapi dan gula menjadi komoditas pangan utama yang diberikan perhatian secara khusus dalam pencapaian target swasembada berkelanjutan. Kelembagaan petani memiliki titik strategis dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu segala sumberdaya yang ada di pedesaan perlu diarahkan/diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan posisi tawar petani (kelompok tani). Saat ini potret petani dan kelembagaan petani di Indonesia diakui masih belum sebagaimana yang diharapkan (Deptan, 2006:3).

Pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat petani yang merupakan porsi terbesar dari struktur masyarakat Indonesia. Berbagai bentuk program telah diterapkan untuk membantu petani agar mampu memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dalam perekonomian di Indonesia. Berbagai skim bantuan juga telah dilaksanakan mulai dari subsidi Sarana Produksi, Bantuan Modal Langsung, Kredit Usaha Tani dan lain sebagainya yang jumlahnya sangat beragam. Namun hasilnya petani Indonesia masih berpendapatan rendah, masih tergantung terhadap berbagai bantuan dan masih selalu berfikir belum mampu bergerak sendiri dalam melaksanakan usaha taninya. Begitu pula dengan program-program penyuluhan pertanian yang selama ini sudah berjalan, belum mampu secara optimal membantu petani dalam meningkatkan taraf hidupnya, serta belum mampu mendorong petani untuk menemukan pemecahan masalahnya sendiri dalam melaksanakan usahatannya (Mushero, 2008:96).

Upaya mencapai itu semua diperlukan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang baik, selanjutnya dibutuhkan kelembagaan, ketenagaan yang kompeten, mekanisme dan tata kerja yang jelas termasuk supervise, monitoring

dan evaluasi yang efektif dan pembiayaan yang memadai. UU No. 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (SP3K) sebagai wujud refitalisasi penyuluhan pertanian, telah mengatur penyelenggaraan penyuluhan yang baik. Untuk implementasi UU SP3K tersebut menghendaki kearifan lokal dari otonomi daerah. Berdasarkan hal tersebut peran penyuluhan pertanian diposisikan pada posisi yang strategis dimana kelembagaan penyuluhan pertanian berada dan dapat berhubungan langsung dengan bupati, sehingga penyelenggaraan penyuluhan pertanian betul-betul terkoordinir dan bisa berjalan efektif dan efisien (Deptan, 2006:4).

Permasalahan yang masih melekat pada sosok petani dan kelembagaan petani di Indonesia adalah: 1. Masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran. 2. Belum terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan Agribisnis. Aktivitas petani masih terfokus pada kegiatan produksi (on farm). 3. Peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal. Untuk mengatasi permasalahan di atas perlu melakukan upaya pengembangan, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani (seperti: kelompok tani, lembaga tenaga kerja, kelembagaan penyedia input, kelembagaan output, kelembagaan penyuluh dan kelembagaan permodalan) dan diharapkan dapat melindungi bargaining position petani. Tindakan perlindungan sebagai keberpihakan pada petani tersebut, baik sebagai produsen maupun penikmat hasil jerih payah usahatani mereka terutama diwujudkan melalui tingkat harga output yang layak dan menguntungkan petani. Dengan demikian, penguatan dan pemberdayaan kelembagaan tersebut juga untuk menghasilkan pencapaian kesinambungan dan keberlanjutan daya dukung SDA dan berbagai usaha untuk menopang dan menunjang aktivitas kehidupan pembangunan pertanian di pedesaan (Dimiyati, 2007:12).

Sistem tanam jajar legowo adalah penanaman padi yang diatur sedemikian rupa dengan lorong atau ruang terbuka yang cukup lebar. Cara tanam padi sistem jajar legowo bertujuan untuk memperbaiki produktivitas usahatani padi. Legowo diambil dari Bahasa Jawa Banyumas, terdiri dari kata “Lego” dan “Dowo”. Lego

berarti luas dan Dowo berarti memanjang, jadi diantara kelompok tanaman padi terdapat lorong yang luas dan memanjang sepanjang barisan tanaman (Imran dan Syarifudin, 2005:7).

Dengan adanya sistem tanam legowo ini merupakan rekayasa teknologi yang ditujukan untuk memperbaiki produktivitas usahatani padi. Teknologi ini merupakan perubahan dari teknologi jarak tanam tegel menjadi tanam jajar legowo. Di antara kelompok barisan tanaman padi terdapat lorong yang luas dan memanjang sepanjang barisan. Jarak antar kelompok barisan (lorong) bisa mencapai 50 cm, 60 cm atau 70 cm bergantung pada kesuburan tanah.

Di Kabupaten Gorontalo utara penerapan penanaman jajar legowo sudah diterapkan karena dengan adanya rekayasa populasi tanaman melalui sistem tanam Jajar Legowo dapat meningkatkan produksi 15-20% dibandingkan sistem tanam konvensional. Khususnya di Kecamatan Kwandang juga sudah mengadopsi penanaman sistem jajar legowo agar dapat meningkatkan hasil produksi padi sawah akan tetapi pemerintah masih mendapatkan kendala-kendala yang di hadapi untuk meningkatkan penggunaan sistem tanam jajar legowo, sehingga pemerintah yang khususnya berada di Kecamatan Kwandang melakukan pendekatan kepada petani dengan cara mengumpulkan ketua-ketua kelompok tani dan menggunakan anggota sipil seperti babinsa agar petani mau menggunakan sistem tanam jajar legowo. Adapun luas lahan yang di tanamai padi sawah di Kecamatan Kwandang yaitu seluas 900,72 Hektar dan yang menggunakan sistem jajar legowo sekitar 102 hektar dan menghasilkan 5-8 Ton/hektar, maka jumlah produksi yang menggunakan sistem jajar legowo yaitu 714 Ton (BP3K Gorut 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian tentang penguatan kelembagaan petani dalam peningkatan produksi padi sawah sistem jajar legowo di Provinsi Gorontalo penting dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani khususnya petani yang ada di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka di rumuskan masalah diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lembaga petani terhadap penerapan sistem tanam jajar legowo pada usahatani padi di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara ?
2. Bagaimana penguatan kelembagaan petani dalam penerapan sistem jajar legowo di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui peran lembaga petani terhadap penerapan sistem tanam jajar legowo pada usahatani padi di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Mengetahui penguatan kelembagaan petani dalam penerapan sistem jajar legowo di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan, dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian pada pertanian dengan mempertimbangkan sistem pendanaan yang dapat mempengaruhi kinerja para petani.
2. Sebagai pertimbangan dalam membuat materi yang selalu baru dan pragmatis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.